

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah pada Desentralisasi Fiskal dan SILPA pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2020, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal memiliki hubungan yang berbanding lurus. Semakin tinggi nilai desentralisasi fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi juga tingkat pengeluaran Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan karena jumlah Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan salah satu sumber penerimaan daerah khususnya untuk pembangunan pelayanan publik
2. SILPA memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. SILPA dan Belanja Modal memiliki hubungan yang berbanding lurus. Semakin tinggi nilai desentralisasi fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi juga tingkat pengeluaran Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan karena SILPA merupakan salah satu dana yang digunakan dalam pembangunan daerah.
3. Desentralisasi Fiskal dan SILPA secara bersamaan memiliki pengaruh secara simultan signifikan sebesar 26% terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dimana sisanya senilai 74% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti penulis.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus selalu berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerahnya

terutama dalam meningkatkan PAD agar dapat menjadi daerah yang mandiri dan tidak ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat sehingga dapat meningkatkan belanja modal pemerintah serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan pembangunan daerah tersebut.

2. Pemerintah hendaknya mengelola aset dengan sebaik mungkin dan memanfaatkan dana yang diterima dari pusat untuk perbaikan fasilitas umum sehingga masyarakat nyaman dalam menggunakannya.
3. Pemerintah sebaiknya mengupayakan penggalan sumber daya alam yang baru sehingga dapat meningkatkan PAD agar dapat meningkatkan kegiatan belanja modal dan memaksimalkan penggunaan SILPA tahun sebelumnya untuk pembangunan dalam rangka pelayanan publik.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel-variabel independen lainnya yang belum digunakan dalam penelitian ini serta dapat mempelajari lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik.